



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 18 Oktober 2016

Memburu Otak Korupsi APBD SBB

TIM Kejati Maluku diturunkan ke Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) untuk memeriksa saksi-saksi kasus dugaan korupsi APBD tahun 2007-2009. Tim yang dipimpin oleh Adam Saimima selaku koordinator Kejati Maluku ini sudah mencecar puluhan saksi, baik pejabat eselon III maupun sejumlah staf di Pemkab SBB.

Pemeriksaan yang dilakukan hanya untuk memperkuat bukti-bukti yang sudah dikantongi. Kasus dugaan korupsi APBD senilai Rp 2 miliar lebih ini diusut tim Kejagung sejak tahun 2011. Setelah melalui proses panjang tim menemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga dinaikan ke tahap penyidikan.

Naiknya pengusutan kasus ini ke tahap penyidikan berdasarkan surat perintah Direktur Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Nomor: Print-194/F.d.1/12/2011 tanggal 20 Desember 2011.

Untuk mempercepat penuntasan kasus ini, Kejagung kemudian melimpahkan penanganannya sejak Agustus 2016 kepada Kejati Maluku. Atas instruksi Kejagung, Kepala Kejati Maluku Yan S Maringka mengeluarkan surat perintah penyidikan Nomor Print 12/S.1/F.d/1/08/2016. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Victor Saut yang memimpin tim untuk mengusut kasus tersebut.

Mantan Bupati SBB, Jacobus F. Puttileihalat diduga terlibat dalam kasus ini. Ia masuk dalam daftar bidikan Korps Adhyaksa. Pertanyaannya apakah Kejati Maluku memiliki komitmen untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Tuntas artinya tidak sebatas kasus ini sampai ke pengadilan, tetapi siapapun yang terlibat jangan ada yang diloloskan.

Menuntaskan kasus ini butuh komitmen pimpinan dan jajaran di Kejati Maluku. Sebab banyak fakta yang memberi gambaran penanganan kasus-kasus korupsi di Kabupaten SBB tidak tuntas. Hanya pejabat kelas teri yang dijerat, tetapi hukum tidak menyentuh lingkaran penguasa.

Lihat saja kasus korupsi dana Biaya Tak Terduga (BTT) tahun 2013 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) senilai Rp 1 miliar. Bupati saat itu, Jacobus F. Puttileihalat juga disebut-sebut terlibat. Bob, sapaan Jacobus Puttileihalat disebut yang mengotaki pencairan dana BTT. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Rp 1 miliar dari total dana Rp 2 miliar lebih tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Saat diperiksa Bob membantah semua tuduhan Plt Kadis PPKAD Kabupaten SBB Ronny Rumlatau. Bob justru balik menuduh anak buahnya itu yang memalsukan tanda tangan dan capnya untuk mencairkan dana BTT.

Tuduhan yang serius, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh penyidik Kejati Maluku. Pernyataan Kejati Maluku untuk menguji tanda tangan Bob dan cap bupati di labforensik hanya wacana, tidak ada realiasinya. Kejati Maluku setengah hati, sehingga yang dijerat hanya Ronny Rumlatau.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Nama Bob juga disebut menerima uang ratusan juta rupiah dari kasus korupsi Kegiatan Pembinaan Kelompok Kerja Guru Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG MGMP) dan Training of Trainers Guru dan Pengawas untuk kurikulum Tahun 2013. Tetapi menurut jaksa bukti untuk menjeratnya lemah. Sehingga yang dijadikan tersangka adalah mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten SBB, Bonjamina Louisa Puttileihalat alias Lou dan PPTK Ledrik Sinanu. Bob bebas lagi.

Nah, kita menunggu hasil penyidikan kasus korupsi APBD tahu 2007-2009, endingnya seperi apa. Apakah praktik tebang pilih masih diberlakukan?. Otak korupsi harus diburu, jangan merasa berprestasi dengan menjerat tersangka kelas bawah, sementara kelas kakap dilindungi. (*)